

ABSTRAK

HERLINA *Sanksi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan Dengan Jarimah Ta'zir Dalam Fiqh Jinayah*

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana yang sejak lama terjadi terutama di Indonesia, dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi bahkan bisa terjadi setiap hari. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas dan peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa/benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perbuatan ini merupakan tindak pidana, sebab memberikan dampak kerugian yang ditimbulkannya baik terhadap individu ataupun masyarakat secara umum serta negara. Sedangkan ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia serta menolak segala kemafsadatan bagi umat manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu, bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan bagaimana Relevansi *Ta'zir* dalam *fiqh jinayah* dengan sanksi denda dan kurungan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan bagaimana relevansi *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* dengan sanksi kurungan dan denda dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Konsep *jinayah* berkaitan erat dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam *fiqh jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Pelanggaran Lalu Lintas sebagai suatu tindak pidana memang tidak tercantum secara eksplisit dalam *fiqh jinayah* sehingga dikategorikan sebagai suatu tindak pidana modern yang mengakibatkan terganggunya kemaslahatan. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) *ta'zir* merupakan sanksi bagi tindak pidana modern sesuai dengan kaidah "*At-ta'ziru Yaduuru Ma'al Maslahat*" *ta'zir* itu sangat bergantung pada tuntutan kemaslahatan.

Penelitian ini digunakan metode *content analysis* yang melihat teks-teks yang terkandung dalam undang-undang dengan adanya data-data dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tertier berupa ensiklopedi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan *jarimah* karena segala hal yang menjadi unsur dalam pelanggaran lalu lintas telah memenuhi unsur *jarimah*. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam *fiqh jinayah* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Sanksi tindak pidananya adalah termasuk pada sanksi *ta'zir* yakni berupa hukuman kurung/penjara tebatas (*al-habsul mu'tamadi*) dan hukuman denda. Jelas dapat terlihat adanya relevansi antara hukum Positif dengan Hukum Islam, yang menjadi perbedaan adalah jika dalam hukum positif sanksi penjara berupa hukuman pokok bagi semua tindak pidana, tetapi dalam *fiqh jinayah* sanksi penjara merupakan alternatif sebagai sanksi pada *jarimah ta'zir*.